

Selamat Bertugas, Mewujudkan DIY Lebih Mulia & Bermartabat



YOGYA (KR) - Pelantikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo yang dilaksanakan Senin (10/10) menjadi titik awal menuju Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin baik pada lima tahun ke depan. Peristiwa yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta ini menggambarkan Keistimewaan DIY yang kembali berulang. Salah satu amanat dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah mekanisme penetapan pimpinan daerah di DIY. Dalam hal ini, tercantum secara jelas bahwa Gubernur DIY dijabat oleh Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur DIY dijabat oleh Adipati Pakualaman.

Segala prestasi yang telah diraih pada periode-periode yang lalu justru menjadi cambuk dan tantang-

an bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus dan lebih baik lagi melayani masyarakat. Masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, salah satunya ialah persoalan kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan ini adalah dengan mengembangkan kawasan selatan DIY. Upaya ini bahkan telah menjadi prioritas sejak periode kepemimpinan lima tahun yang lalu, dan kembali

menjadi visi-misi periode 2022-2027 sebagai aksi keberlanjutan program Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya lainnya adalah mereformasi birokrasi pemerintahan dengan diawali dari kalurahan. Kalurahan di *setting* untuk lebih berperan meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Kelurahan

merupakan ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di DIY yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Reformasi Kalurahan menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model untuk menjawab kompleksitas dan ke-dalaman permasalahan yang saat ini dihadapi DIY.

Pada sisi pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, dilakukan percepatan trans-

formasi spasial kawasan selatan serta transformasi kelembagaan kalurahan dilakukan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Cakupannya adalah penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas. Selain itu pengembangan sistem tata kelola dan pengelolaan lahan berbasis teknologi informasi.

(Ria/Ira)